

**KONSEP UMMAH DALAM PIAGAM MADINAH; ASAS DEMOKRASI NABI
MUHAMMAD DAN RELEVANSINYA DI INDONESIA**

Oleh: Febri Hijroh Mukhlis

Dosen Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Kediri

Email: hi_jroh@iainkediri.ac.id

Abstrak:

Konsep *ummah* dan warga negara di Indonesia memiliki kesamaan. Tulisan ini kembali menghadirkan bagaimana kontekstualisasi pesan-pesan Nabi Muhammad dalam piagam madinah itu di Indonesia. Para tokoh dan ulama di Indonesia telah berhasil membumikan pesan Nabi Muhammad sesuai dengan zamannya. Indonesia dalam ragam identitas agama dan budaya, mesti memiliki simbol persatuan dan kesatuan. Titik temu itu bernama Pancasila. Ideologi Pancasila ini menjadi alat pemersatu bangsa dengan memberikan pemahaman bahwa dalam kehidupan demokrasi, seseorang selain menjadi seorang warga agama, ia juga seorang warga negara.

Kata kunci:

Ummah, Warga Negara, Pancasila, Nabi, Madinah, Indonesia.

Pendahuluan

Nabi Muhammad membawa pesan kenabian dalam dua periode, yakni di Makkah dan Madinah. Perjalanan dakwah Nabi ini tidak mudah, Islam bukanlah agama pertama yang dikenal oleh dua peradaban ini. Karena itu kedatangan Nabi membawa dampak cultural-sosiologis-politis, dimana seluruh masyarakat pra-Islam merasa telah mapan dengan keyakinan lama dan kemudian datang keyakinan baru dengan segala bentuk perubahan. Nabi menghadapi keragaman dan subkultur tiap peradaban lama, dan ini menjadi tantangan dakwah Nabi, bagaimana Nabi menyelesaikan serta sikap apa yang diambil dalam menghadapi keragaman agama dan juga budaya tersebut?

Pasca periode Makkah, Nabi berhijrah ke Madinah tahun 622 M. Di Madinah Nabi Muhammad berhadapan dengan keragaman adat, budaya dan agama. Madinah selain sebagai pusat perdagangan, ia juga tempat yang aman dan subur. Banyak penghuni Madinah yang berasal dari beberapa daerah luar untuk mencari perlindungan di dalamnya. Corak masyarakat Madinah adalah heterogen banyak suku

dan juga kabilah sebagaimana di Makkah, seperti khazraj, yahudi, auz, dan lain-lain. Dalam perkembangannya keragaman suku ini juga mengalami konfrontasi dengan peran kenabian Muhammad, sehingga diperlukan gerakan “politik” Nabi dalam rangka menyelesaikan kesaling tuduhan antar kelompok di Madinah.

Nabi Muhammad dalam perannya seorang pembawa risalah ketuhanan memiliki kemampuan istimewa dibandingkan yang lain. Meskipun selama ini tidak pernah dikenal seperti apa Nabi memimpin sebuah komunitas dalam bentuk Negara, namun Nabi mengajarkan bagaimana bernegara dengan baik, tidak hanya itu tapi juga bagaimana berpolitik yang baik. Dari sini akan penulis uraikan bagaimana “kenegarawanan” Nabi Muhammad di Madinah dan relevansinya di Indonesia.

Latar Sejarah Kota Madinah

Nabi Muhammad berhijrah ke Madinah bukan hanya desakan situasi Makkah semata. Memang Nabi memerintahkan umat Islam berpindah ke Yastrib (Madinah) untuk mencari perlindungan. Namun misi perdamaian Nabi dimulai sejak pertama kali perjanjian dibuat, disebut dengan Baitul Aqabah, perjanjian ini dibuat ketika Nabi Masih di Makkah untuk mentaati Nabi sebagai seorang pemimpin. Pasca musim haji ada 75 orang utusan dari Yastrib datang ke Makkah untuk membuat perjanjian Baitul Aqabah kedua yang berisikan persekutuan antara muslim Makkah dan Yastrib. Dari sini dapat dipahami bahwa Nabi datang ke Yastrib dengan membawa misi perdamaian.¹

Penduduk masyarakat Madinah beragam, selain kehadiran masyarakat muslim, di sana hidup juga suku Auz, Khazraj, dan Yahudi, serta Muhajir dari suku Quraisy dan suku-suku Arab lainnya. Dari sini dapat dipahami bahwa masyarakat Madinah bersifat majemuk atau heterogon dengan hidup berbagai suku dan agama. Corak kehidupan masyarakat Madinah masih menggunakan sistem kesukuan dengan adat istiadat yang beragam pula. Dilihat dari sisi keyakinan beragama semestinya juga

¹ Jamal Ghofir, *Piagam Madinah: Nilai Toleransi dalam Dakwah Nabi Muhammad SAW*, (Yogyakarta: Aura Pustaka, 2012), hlm. 49-50.

beragam, ada yang penganut Islam, Kristen, golongan munafik serta penyembah berhala.²

Setelah Nabi tiba di Yastrib, Nabi Muhammad merubah namanya menjadi Madinah.³ Perubahan ini membawa dampak penting bagi peradaban Madinah selanjutnya. Tujuan Nabi berada di Madinah adalah membentuk sebuah komunitas kesatuan antar penduduk Madinah, Nabi menginginkan semua kalangan hidup berdampingan dan menjalankan keyakinannya tanpa ada rasa takut dan curiga. Implementasi dari keinginan Nabi untuk menciptakan perdamaian di Madinah adalah lahirnya Piagam Madinah (*charter of Medina*).

Piagam Madinah merupakan bukti bahwa Nabi bersungguh-sungguh membangun kedamaian dan toleransi. Gagasan Nabi mengenai toleransi ini membuktikan bahwa Nabi adalah seorang pemimpin yang adil, bijaksana dan toleran. Nabi tidak menunjukkan kediktatoran sebagai seorang pemimpin dari agama Islam, namun ia membuktikan dirinya mampu hidup dalam kebersamaan dan keragaman budaya serta agama. Selain itu, Nabi Muhammad memberikan contoh bahwa Islam itu membawa kedamaian bukan permusuhan

Konsep Ummah dalam Piagam Madinah: Membaca Politik Nabi Muhammad

Kata “*ummah*” disebutkan sekali dalam Piagam Madinah. Bahkan ia disebutkan dalam pasal pertama dari 47 pasal, demikian bunyinya, “*Sesungguhnya mereka adalah umat yang satu, tidak termasuk golongan yang lain*”. Ummah dalam piagam madinah merupakan representasi komunitas tanpa kesukuan. Di mana semua kalangan hidup bersama tanpa ada rasa saling menjatuhkan, apalagi konflik antar suku atas nama agama sekalipun.

Piagam Madinah membawa prinsip-prinsip kesatuan dan persatuan. Selain itu prinsip ini merupakan bentuk dari implementasi konsep ummah tersebut. Ummah digagas oleh Nabi merupakan wujud dari hubungan baik antar golongan, selain itu

² Ibid, 51-56.

³ Ibid, 61.

Nabi mengajarkan kepada umat Islam untuk berbuat sebagaimana dirinya bagaimana menghadapi keragaman yang ada. Nabi tidak pernah menolak kemajemukan masyarakat Madinah, namun justru berdiri didepan membangun perdamaian dan hubungan baik antar budaya dan agama.

Prinsip-prinsip Ummah dalam Piagam Madinah tercermin dalam isi dari pasal-pasal di dalamnya. Suyuti Pulungan menjelaskan bahwa prinsip-prinsip dalam Piagam Madinah sebagaimana berikut, yakni prinsip persatuan dan persaudaraan, prinsip persamaan, prinsip kebebasan, prinsip hubungan antar pemeluk agama, prinsip pertahanan, prinsip hidup bertetangga, prinsip hidup tolong menolong dan membela yang lemah dan teraniaya, prinsip perdamaian, prinsip musyawarah, prinsip keadilan, prinsip pelaksanaan hukum, prinsip kepemimpinan, dan prinsip ketakwaan, amar ma'ruf dan nahi munkar.⁴

Sebagai sebuah komunitas masyarakat yang hidup berdampingan dengan prinsip-prinsip demikian, Madinah layak disebut sebagai “Negara pertama” dalam peradaban Islam. Meskipun Nabi tidak pernah menyebutkan Madinah sebagai sebuah Negara, namun Nabi mencontohkan bagaimana mendirikan konstitusi yang baik sekelas konstitusi Madinah yang mengayomi keragaman dalam perdamaian. Selama ini cita-cita membangun Negara Islam dikumandangkan oleh sebagian kalangan dalam rangka membentuk komunitas Negara syariah, namun cita-cita ini harus melihat lagi bagaimana Nabi membentuk Madinah, Nabi tidak pernah menyebutkan Madinah sebagai Negara Islam, tapi ia sebagai “Ummah” Madinah, bukan Islam, bukan Kristen, apalagi Yahudi pula.

Dari sikap dan keputusan Nabi melahirkan Piagam Madinah, Nabi adalah contoh seorang negarawan pertama yang baik. Piagam Madinah menjadi konstiusi pertama umat Islam yang menginspirasi lahirnya sistem demokrasi. Peran Nabi di Madinah membuktikan bahwa Nabi tidak hanya istimewa sebagai seorang pembawa risalah, namun ia juga istimewa dalam laku politik. Memang istilah politik tidak

⁴ Baca, Suyuthi Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah: Ditinjau dari Pandangan al-Qur'an*, (Yogyakarta: Ombak, 2014), hlm. 144-304.

pernah dikenal waktu itu, namun Nabi berperan secara politik dalam membentuk komunitas masyarakat Madinah.

Secara politik, Nabi datang dari Makkah ke Madinah dengan sebuah komunitas muslim. Umat Islam yang diminta pindah ke Yastrib atau Madinah adalah karena Nabi menginginkan mereka mendapatkan perlindungan. Nabi sebelumnya telah membuat perjanjian dua kali dengan kota Yastrib dalam menjaga dan mengamankan muslim di sana. Setibanya Nabi di Madinah, Nabi menjadikan masyarakat Madinah dalam wadah sebuah komunitas yang satu yakni “Ummah”. Nabi Muhammad dari sini menginginkan keberadaan muslim di Madinah aman, dan Nabi membuktikan dirinya adalah pemimpin toleran dan adil, sebagaimana dibuktikannya dalam piagam madinah dengan menjamin setiap orang memeluk agamanya dan jaminan saling melindungi antar pemeluk agama. Selain itu, Nabi juga memberikan satu pemahaman di Madinah bahwa Islam datang di sana dengan misi perdamaian, Islam adalah agama yang mencintai keragaman, adat istiadat, dan kebudayaan. Dari pembacaan ini politik-dakwah Nabi berperan dalam menjadikan Islam sebagai agama yang menginspirasi lahirnya toleransi di Madinah.

Nabi mengajarkan kesantunan dan toleransi dalam bernegara. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad menunjukkan bahwa ia adalah orang Islam pertama yang mampu membangun sebuah sistem demokrasi. Bisa jadi demokrasi yang lahir kemudian terinspirasi dari peran Nabi ketika berada di Madinah. Demokrasi yang memberikan perlindungan serta jaminan kepada semua orang untuk menjalankan hak dan kewajibannya, memeluk agamanya, kebebasan berpendapat, dan jaminan perlindungan. Demokrasi telah lahir di Madinah atas peran Nabi Muhammad.

Tegaknya Demokrasi di Madinah

Piagam Madinah adalah prestasi luar biasa dalam sejarah peradaban Islam. Menurut Zuhairi Misrawi, Piagam Madinah merupakan sebuah pencapaian spektakuler dari seorang pemimpin umat dan pemimpin politik. Piagam Madinah menandakan bentuk Negara demokratis yang mengusung kebebasan semua orang

untuk menjalankan agamanya, keyakinannya, tanpa ada urusan-urusan hukum yang diatur oleh Negara.⁵

Nabi sebagai pemimpin umat Islam sekaligus pemimpin Madinah tidak kemudian menjadikan Islam sebagai otoritas paling utama untuk mengatur kehidupan masyarakat Madinah. Tidak kemudian melahirkan hukum syariah, Negara syariah dan sebagainya. Nabi justru menjadikan Madinah sebagai Negara demokratis. Piagam Madinah merupakan konstitusi bersama antar agama dan budaya di Madinah. Nabi Muhammad menegakkan pentingnya jaminan kepada semua orang, tidak hanya Islam tapi semua orang. Dari sini ada baiknya kalangan yang mengusung Negara Islam belajar lagi mengenai bagaimana Nabi membangun Madinah menjadi Negara demokratis.

Salah satu hal penting dari prinsip demokrasi di Madinah adalah lahirnya kesetaraan. Semua kalangan dirangkul untuk bicara persoalan bersama dalam rangka membangun komunitas yang demokratis. Dalam piagam Madinah terdapat prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, kebebasan, jaminan perlindungan, dan sebagainya, yang semuanya telah menegakkan Madinah sebagai konsepsi ideal sebuah Negara demokratis.⁶

Tegaknya demokrasi di Madinah tidak lepas dari peran Nabi Muhammad. Meluasnya dakwah Nabi salah satunya karena Madinah menjadi tempat singgah banyak orang yang terdesak dan menjadi perlindungan. Dengan prinsip demokrasi ini semua orang di Madinah dapat hidup bersama tanpa ada rasa takut. Prinsip politik-dakwah yang lain kemudian orang akan tau bahwa Islam adalah agama damai, dengan itu banyak kemudian yang memilih untuk masuk agama Islam. Nilai-nilai demokrasi yang dibangun Nabi berdampak positif dalam membangun konstitusi yang berlatar keragaman dan perbedaan.

⁵ Zuhairi Misrawi, *Madinah: Kota Suci, Piagam Madinah dan Teladan Muhammad SAW*, (Jakarta: Kompas, 2009), hlm. 293.

⁶ Zuhairi Misrawi, *Madinah*, hlm. 306.

Setelah tegaknya sistem demokratis di Madinah. Nabi telah menetapkan asas-asas toleransi antar pemeluk agama.⁷ Bisa dikatakan demokrasi yang melahirkan toleransi ini merupakan kritik terhadap fanatisme-sektarianisme kesukuan, bahkan sistem demokrasi dalam Piagam Madinah telah berhasil mengakhiri fanatisme kesukuan. Fanatisme kesukuan berkecenderungan menutup diri dan arogansi yang berlebihan. Toleransi yang dibangun Nabi adalah bentuk kepedulian pentingnya sikap terbuka dan toleran kepada kelompok lain.

Madinah setelah Nabi membentuknya secara demokratis, ia menjadi peradaban megah dan tempat lahirnya kemajemukan serta persatuan. Di Madinah Nabi berperan menghapus segala bentuk diskriminasi dan intimidasi. Nabi mengajarkan bagaimana melindungi semua orang atas dasar kemanusiaan. Madinah sebagai tempat lahirnya sistem demokrasi umat Islam pertama, menginspirasi banyak pihak dan generasi lintas peradaban untuk mencontohnya. Madinah menjadi peradaban yang tak bisa dilupakan oleh siapapun yang belajar Islam, apalagi belajar mengenai politik Nabi, maka peradaban Madinah adalah pusat studi tentang lahirnya sistem politik yang demokratis tanpa ada saling tuduh dan klaim kebenaran.

Sistem demokrasi yang dibangun Nabi tidak hanya dalam bentuk Negara saja, namun juga mengenai kehidupan sehari-hari. Selain membangun toleransi antar agama, Nabi juga menjaga keharmonisan hidup bertetangga yang baik, bahkan melindungi wanita dan anak-anak. Dari sini Nabi jelas sangat peduli terhadap struktur kehidupan yang harmonis tanpa ada saling menindas. Nabi melindungi yang lemah, menjamin semua orang bekerja, untuk makan, dan juga beragama. Sampai di sini dapat dipahami bahwa Nabi Muhammad telah menegakkan demokrasi, dan menjadikan Madinah sebagai “Negara demokratis pertama” dalam sejarah Islam.

Konsep Ummah dan Pancasila: Sebuah Asas Demokrasi Lintas Peradaban

Kondisi masyarakat Madinah dan Indonesia memiliki kesamaan, yakni kemajemukan. Baik di Madinah maupun di Indonesia keduanya memiliki keragaman

⁷ Ibid, 314.

penduduk, dari latar belakang agama maupun budaya. Dari sini dapat dipahami keduanya memiliki kemiripan ketika kemajemukan dipandang sebagai unsur penting dalam membangun sebuah konstitusi.⁸

Di Madinah, Nabi Muhammad menjadikan Piagam Madinah sebagai aturan-aturan legal-formal untuk mengakhiri konflik serta konfrontasi antar agama. Semua orang mendapat perlindungan dan jaminan hidup layak tanpa ada rasa takut akan adanya gangguan dari manapun. Piagam Madinah merupakan symbol konstitusi dimana masyarakat Madinah yang majemuk dipersatukan dalam satu ikatan, yakni Ummah. Nabi Muhammad meletakkan fondasi agar masyarakat majemuk saling terbuka, toleran dan tolong menolong.

Kondisi di Indonesia kurang lebih sama, hanya saja Indonesia peradaban yang jauh letaknya secara geografis dari Madinah. Indonesia hingga saat ini mayoritas berpenduduk muslim, namun konstitusi tidak menjadikan Islam sebagai basis dasar aturan Negara, namun Indonesia dibangun atas dasar nilai-nilai Pancasila. Dalam butir-butir Pancasila secara legal-formal menegaskan bahwa keragaman budaya, adat, suku, ras, dan agama merupakan kekayaan bangsa. Kemajemukan di Indonesia merupakan identitas tanah air yang tidak bisa disangkal oleh siapapun. Bangsa Indonesia kuat karena keragaman agama budaya.

Pancasila adalah representasi keragaman di Indonesia. Semua orang bisa hidup, mendapatkan jaminan, berkeyakinan atas dasar perlindungan oleh Negara. Indonesia memiliki banyak ragam budaya, agama, dan terdiri dari pulau-pulau, dan nilai-nilai Pancasila lah yang menjadikan sebuah komunitas berbangsa yang satu, yakni Bhineka Tunggal Ika. Slogan ini menjadi penting bagi identitas bangsa, karena persatuan dan kesatuan akan membawa kemajuan serta perkembangan.

Dari penjelasan sekilas demikian, Piagam Madinah dan Pancasila merupakan konsepsi konstitusi, membangun Negara atas berbagai keragaman. Madinah dan

⁸ Baca, Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945: Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat Yang Majemuk*, (Jakarta: UI-Press, 1995), hlm. 22-34.

Indonesia merepresentasikan semua itu, bahwa aturan harus dibuat untuk memberikan jaminan kepada semua orang dalam rangka menjalankan segala aktifitasnya tanpa ada diskriminasi dari siapapun, meskipun itu adalah Negara, yang paling penting adalah jika setiap aktifitas tidak bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dan nasionalisme maka ia tetap menjadi warga Negara yang baik.

Pancasila dan Peradaban Islam di Indonesia

Pancasila adalah titah final para pendiri bangsa. Piagam Madinah juga menjadi undang-undang paripurna bagi masyarakat Madinah saat itu. Dua peradaban yang berbeda secara geografis dan kultural, namun memiliki cara pandang yang sama dalam menghadapi pluralitas kehidupan warga bangsa. Indonesia kini menjadi cermin dunia dalam merespon kajian budaya dan toleransi antar umat beragama. Pancasila merupakan representasi dari nilai-nilai ke-Islaman yang pernah dibuat oleh Nabi Muhammad saw. Nilai-nilai ke-Indonesiaan tercermin dalam bingkai berbangsa dan bernegara. Semua umat beragama mesti paham bagaimana membumikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Islam di Indonesia dianut oleh mayoritas penduduknya. Namun hampir tidak ada gerakan yang menginginkan Islam menjadi ideologi negara. Ada beberapa kelompok garis keras yang hingga kini pernah menyuarakan ideologi khilafah anti-Pancasila di Indonesia, namun tidak satupun yang berhasil. Hal demikian menandakan bahwa Pancasila telah berhasil menjadi kesadaran beragama dan berbangsa sekaligus. Seringkali gerakan takfiri merongrong nasionalisme, justru nilai kebangsaan juga semakin kuat.

Kita amati dari dinamika politik Islam di Indonesia, sejak 2014 hingga 2019 ini, banyak gerakan politik Islam yang seringkali memainkan narasi keagamaan dalam ranah politik publik. Istilah tuduhan kafir sesat kepada yang berbeda agama sering terdengar, ironisnya bukan sekedar beda agama-keyakinan, kini beda pilihan politikpun juga mendapat tuduhan sesat-kafir. Ini semua menandakan bahwa politik Islam menjadi wacana publik yang berpengaruh bagi dinamika politik di Indonesia.

Peradaban Islam di Indonesia kini memasuki era keemasan. Kajian kebangsaan dan keagamaan menjadi inti gerakan publik. Di era teknologi dan industry digital, semua orang secara terbuka berargumentasi tentang berbagai isu yang berkembang melalui konten-konten kreatif. Fenomena perkembangan ini menjadi trend baru Islam di Indonesia. Perang argumentasi tidak hanya pertarungan diatas meja dan kursi, namun beralih di sosial media dan sejenisnya. Lalu, apa pengaruhnya bagi peradaban Islam di Indonesia?

Islam di Indonesia berpengaruh besar bagi perkembangan Islam di dunia. Banyak para peneliti luar negeri yang kini menaruh perhatian terhadap kajian Islam di Indonesia. mereka tertarik melakukan riset tentang dunia politik, sosial, budaya, dan pesantren di Indonesia. peradaban Islam yang multikultur ini menjadikan Indonesia sebagai rujukan peradaban dunia. Indonesia sudah layak dikatakan berhasil memabawa peradamaian dan toleransi di tengah ratusan perbedaan kultur dan latar belakang.

Dibanding dengan kota Madinah saat itu, Indonesia jauh lebih beragam. Indonesia memiliki corak keberagaman yang berbeda. Namun Pancasila mengandung nilai-nilai keIslaman yang pernah dibuat sebagaimana tertulis dalam piagam madinah. Pancasila tidak bisa ditolak keberadaannya. Pancasila tidak sama sekali bertentangan dengan nilai-nilai moral keIslaman bahkan agama lain. Semua agama di Indonesia menerima dan memandang pancasila sebagai satu-satunya ideologi sah bangsa Indonesia.

Bisa ditegaska seperti ini, bahwa pancasila itu lahir dari hasil tafsiran para tokoh bangsa dan ulama di Indonesia. Islam sama sekali tidak pernah menyebutkan sistem tata negara yang baik seperti apa. Islam bahkan Nabi sendiri tidak pernah memerintahkan harus khilafah. Nabi Muhammad melalui ajaran Islam mewariskan tata cara bagaimana membangun sebuah Negara. Munawwir Sadjzali, Islam tidak mempunyai sistem politik dan hanya memiliki seperangkat nilai tata nilai etis yang

bisa digunakan dalam penyelenggaraan Negara.⁹ Inilah yang dimaksud bahwa pancasila sudah memuat sistem nilai yang pernah digariskan oleh Islam, tidak ada sama sekali pertentangannya dengan Islam.

Mengenai hubungan agama dan negara di Indonesia ini hal yang menarik. Di satu sisi tidak ada agama manapun menjadi ideologi negara, melainkan semua menerima pancasila sebagai satu-satunya. Semua ini lahir dari sejarah yang panjang, dari pra hingga pasca kemerdekaan, ketika presiden Soekarno pertama kali menyatakan pancasila sebagai ideologi sah negara banyak pemimpin negara di dunia menaruh kekaguman luarbiasa. Kini, terbukti banyak negara-negara dunia belajar bagaimana praktek pancasila di Indonesia.

Di Indonesia hampir tidak ada tarik menarik antara agama dan negara. keduanya saling berkomunikasi dan menguatkan. Indonesia ini peradaban besar, memiliki jutaan umat beragama. Bayangkan jika semua umat beragama saling memaksakan diri agamanya sebagai ideologi negara, jadi apa negara ini, bisa jadi justru akan lahir pertumpahan darah di mana-mana. Pancasila ini memiliki posisi penting, sebagai titik temu dan jembatan bagi keragaman. Pancasila adalah meja bersama dalam merumuskan segala persoalan bangsa.

Revolusi industry 4.0 memaksa semua orang bergerak cepat. Pemerintah dan warga bangsa harus bekerjasama tanpa pandang perbedaan pandangan. Revolusi industri harus dipikirkan berdasar kepentingan bangsa. Jadi hal remeh temeh urusan politik identitas sudah semestinya ditinggalkan. Peradaban dunia semakin maju atas perkembangan teknologi yang ada. Maka semua elemen bangsa harus siap dengan semua itu. Pancasila sudah meramalkan bahwa di masa depan revolusi kehidupan membutuhkan kerjasama lintas budaya. Inilah pentinnya kita semua berkesadaran pancasila secara final.

Menurut Sayafi'i Maarif, Pancasila adalah hasil kompromi, tidak seorang pun atau agama apapun yang dapat memungkirinya.¹⁰ Kalau masih ada yang menyatakan

⁹ Baca, Munawir Sadjazli, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1990), hlm. 233.

bahwa Pancasila adalah buatan kelompok tertentu atau individu tertentu itu sebuah kesalahan. Jelas sejarah secara gamblang menegaskan bahwa Pancasila dirumuskan, didiskusikan, dibuat secara bersama-sama melibatkan banyak kepentingan. Jika ada kelompok atau individu masih mempertanyakan keberadaan Pancasila, patut dipertanyakan kembali sejauhmana pengetahuannya terhadap sejarah bangsa ini, dan terpenting nasionalisme dalam dirinya.

Ide khilafah yang pernah ramai di Indonesia ini perlu mendapat perhatian. Khilafah ini bukan main-main lagi gerakannya. Meskipun tahun 2019 ini pemerintah telah membekukn HTI sebagai kelompok yang jelas-jelas mengusung ide khilafah. Namun pemerintah dan semua warga negara patut terus menerus membangun kewaspadaan bersama. Gerakan kelompok pengusung khilafah ini berbahaya bagi bangsa. jika dibiarkan mereka tidak hanya merusak kesatuan bangsa, bisa jadi berusaha mengambil alih perumusakan kebijakan negara, baik lewat jalur pendidikan maupun politik.

Gerakan politik Islam sekali lagi menjadi medan perang bagi kelompok pengusung ide khilafah. Propaganda anti Pancasila sering kali menggema pada pertarungan politik di Indonesia. Sudah informasi umum para pemilu serentak tahun 2019 ini saja, politik Islam sangat kuat, bahkan disebut-sebut ide khilafah ada dibalik berbagai kerusakan dan propaganda kebencian terhadap pemerintahan. Kewaspadaan ini harus berlanjut agar kelompok garis keras tidak semena-mena terhadap ideologi sah kita bersama.

Para pengusung ide khilafah sangat anti terhadap pemimpin non-muslim di Indonesia. Pertarungan politik DKI Jakarta 2017 lalu, antara Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama menyisakan cerita menarik di Indonesia. Hampir semua orator ramai bicara tafsir seputar pemimpin non muslim di Indonesia. istilah tuduhan sesat-kafir menjadi makanan publik, tidak hanya Jakarta bahkan hingga ke daerah-daerah. Dinama politik di Jakarta waktu itu jelas sangat ada kelompok yang menginginkan

¹⁰ Ahmad Syafii Ma'arif, *Islam dan Masalah Kenegaraan* (Jakarta: LP3ES, 1985), hlm. 146.
Al-Tadabbur: Kajian Sosial, Peradaban dan Agama Vol: 5 No: 1, Juni 2019

adanya konflik. Meraka (kelompok radikal) berusaha membangun opini publik bahwa bahwa ada pemerintahan anti-Islam, anti-al-Qur'an dan seterusnya.

Publik kini sangat mudah opininya digiring melalui ujaran di sosial media. Sudah seringkali terdengar sosial media menjadi sarana salin menjatuhkan bahkan propaganda ide khilafah di Indonesia. Teknologi informasi ini berevolusi secara cepat, makanya kelompok kecil bisa lakukan propaganda besar dengan menguasai media teknologi bahkan bisa ditambah industry saat ini.

Peta politik di Indonesia saat ini menempatkan Islam sebagai poros gerakan utama. Banyak tokoh dan organisasi Islam di Indonesia yang berperan menjadi identitas kebangsaan secara baik. Sebut saja NU dan Muhammadiyah yang hingga kini secara tegas berada pada posisi yang benar, menjaga NKRI dan kedaulatan bangsa. Kedua ormas besar ini menjadi pilar penting bagi Pancasila di Indonesia.

Beberapa tahun mendatang peradaban Islam di Indonesia akan mengambil peran besar dalam peta politik dan sosial di Indonesia. Demi menjaga negara ini agar tidak jatuh pada arus konflik identitas seperti Iran dan Suriah, maka Islam di Indonesia memang perlu menunjukkan identitasnya. BerIslam namun tetap berIndonesia, secara adat dan kebudayaan. kenapa hal demikian penting, ini demi menjaga warisan etis leluhur bangsa. Islamnya kuat di tengah arus perkembangan global, namun identitas budaya tetap mampu dipertahankan secara baik.

Pergolakan gerakan kelompok Islam di Indonesia akan menunjukkan wajah baru pasca pemilu 2019. Apalagi musuh nyata bangsa ini jelas tampaknya yakni kelompok radikal beridekan khilafah islamiyah. Maka peran-peran baru, posisi-posisi strategis akan memainkan peran penting dalam menjaga kedaulatan bangsa. Maka tentu kita semua menantikan peran-peran penting dari para pemimpin bangsa ini dalam menjaga serta keseriusanya dalam membumkam pancasila dalam ranah semua kehidupan publik.

Singkatnya, konsep *ummah* dalam piagam madinah kini ditafsirkan dalam konteks kewarganegaraan. Di Indonesia orang memiliki dua dimensi kewargaan yang

wajib dipahami, yakni sebagai warga agama sekaligus warga negara. Warga agama berarti seseorang menjadi bagian dari ritual keagamaan yang dianutnya. Dengan ini seseorang menjalankan peribadatan berdasarkan keyakinannya masing-masing. Maka keyakinan agama itu sifatnya pribadi, tidak ada satupun yang memberikan intervensi, pemaksaan, maupun penodaan. Sebagai warga agama seseorang dituntut patuh dan taat kepada norma moral keagamaan yang dianutnya sendiri.

Pada sisi yang lain, seseorang juga sebagai warga negara, ia dituntut mengambil bagian menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Seseorang dalam hidup bernegara wajib untuk meninggikan toleransi dan saling menghargai. Ada suatu waktu dan situasi di mana seseorang menanggalkan untuk sementara identitas dan latarbelakangnya. Maka dari itu sebagai seorang warga negara ada hukum berbangsa di mana semua orang untuk saling berbagi dan bekerjasama melintasi dasar keimanan sekalipun.

Konsep warga negara di Indonesia mencerminkan tafsiran atas asas demokrasi Nabi dalam piagam madinah. Kewarganegaraan adalah kunci kehidupan berbangsa. Nilai moral kehidupan berbangsa bahkan beragama adalah saling menghormati satu sama lain. Maka itulah alasan kuat di mana kewarganegaraan seseorang semestinya selalu diperkuat dengan wacana kebangsaan berimbang dengan kajian keagamaan. Di Indonesia sendiri cinta tanah air dipertegas merupakan bagian dari praktek keimanan. Menjaga tanah air dari tindak gerakan kelompok radikal adalah jihad dalam bentuk lain, jihad kekinian dalam konteks keIndonesiaan.

Baru-baru ini memang kajian seputar jihad ini kerap kali salah dipahami oleh sebagian kelompok orang. Jihad masih saja dipahami sebagai tindakan arogan, bahkan melukai, adapula memaksa yang lain untuk menuruti kehendak agamanya. Hal demikian jelas tidak sesuai dengan asas demokrasi yang pernah digariskan oleh Nabi saat berada di Madinah. Jihad dalam konteks keIndonesiaan adalah menjaga, mencintai tanah air, serta mengamalkan Pancasila sebagai ideologi sah negara.

Konsep *ummah* dan kewarganegaraan di Indonesia ini memiliki titik temu kesamaan konsep. Kewarganegaraan adalah pengejawantahan pesan nabi. Konsep warga negara merupakan kontekstualisasi konsep *ummah* nya Nabi di Indonesia. Indonesia dengan keragaman agama, budaya, suku, adat, dan identitas ini perlu ada wadah kesadaran bersama yang sering kita sebut sebagai kewarganegaraan. Memang hampir semua negara memiliki konsep kewarganegaraan, namun warga negara di Indonesia memiliki poin penting yang menjadikan semua orang saling membangun kebersamaan, yakni kita memiliki Pancasila.

Penutup

Piagam Madinah merupakan konstitusi yang dibangun oleh Nabi Muhammad di Madinah dengan mendasarkan pada keragaman agama dan budaya. Nabi Muhammad telah memberikan bagaimana demokrasi di Madinah ditegakkan, semua orang berlatarbelakang agama, budaya yang berbeda mendapatkan jaminan, hak dan perlindungan. Islam dihadirkan oleh Nabi di Madinah dengan representasi keadilan, kebijaksanaan, kesetaraan dan keseimbangan.

Indonesia memiliki kesamaan karakter dengan Madinah, yakni keragaman atau kemajemukan. Pancasila menjadi dasar persatuan dan kesatuan di Indonesia. Piagam Madinah dan Pancasila merupakan aturan legal bagi tegaknya demokrasi. Demokrasi yang menjamin siapa saja untuk hidup beragama, berbudaya, tanpa ada rasa saling curiga.

Daftar Rujukan

Ghofir, Jamal. *Piagam Madinah: Nilai Toleransi dalam Dakwah Nabi Muhammad*

SAW. Yogyakarta: Aura Pustaka, 2012.

Ma'arif, Ahmad Syafii. *Islam dan Masalah Kenegaraan*. Jakarta: LP3ES, 1985.

Misrawi, Zuhairi. *Madinah: Kota Suci, Piagam Madinah dan Teladan Muhammad*

SAW. Jakarta: Kompas, 2009.

Pulungan, Suyuthi. *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah: Ditinjau dari Pandangan al-Qur'an*. Yogyakarta: Ombak, 2014.

Sadjazli, Munawir. *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press, 1990.

Sukardja, Ahmad. *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945: Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat Yang Majemuk*. Jakarta: UI-Press, 1995.